

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.417844/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 02
Tanggal : 23 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
- 3. Provinsi : (29) BANTEN
- 4. Kode>Nama Satker : (417844) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
- Sebesar : Rp. 4.394.808.000 (EMPAT MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.394.808.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN RANGKASBITUNG (161) Rp. 4.394.808.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

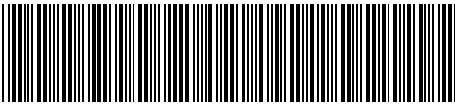
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.01.2.417844/2025

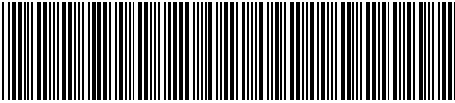


DS:0078-0732-5209-0055

Satker : (417844) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.394.808.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	448.809.000
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	3.945.999.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.417844/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0078-0732-5209-0055

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (417844) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

								Halaman : I A. 1
Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen					4.394.808.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung					448.809.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		6,00	Unit, m2, Paket	448.809.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		6.00	Unit	448.809.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama					3.945.999.000
	:							
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.945.699.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Laporan	700.000
		02	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	3.944.999.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	300.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.00	Dokumen	300.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.417844/2025
I B. SUMBER DANA

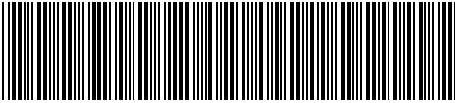


Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (417844) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	4.394.808.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	4.394.808.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.417844/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0078-0732-5209-0055

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (29) BANTEN
Kode>Nama Satker : (417844) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
Kewenangan : (KD)

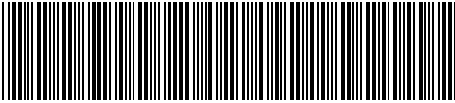
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG	2.555.090	1.390.909	448.809	-	-	4.394.808	29 . 02 161@ 29 . 02 161@ 29 . 02 161@	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.555.090	1.390.909	448.809	-	-	4.394.808		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	448.809	-	-	448.809		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (29.02 BANTEN / KAB. PANDEGLANG)	-	-	448.809	-	-	448.809		
01	RM	-	-	448.809	-	-	448.809		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	2.555.090	1.390.909	-	-	-	3.945.999		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (29.02 BANTEN / KAB. PANDEGLANG)	2.555.090	1.390.609	-	-	-	3.945.699		
01	RM	2.555.090	1.390.609	-	-	-	3.945.699		
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (29.02 BANTEN / KAB. PANDEGLANG)	-	300	-	-	-	300		
01	RM	-	300	-	-	-	300		
JUMLAH		2.555.090	1.390.909	448.809	-	-	4.394.808		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.417844/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0078-0732-5209-0055

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (29) BANTEN
Kode/Nama Satker : (417844) PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

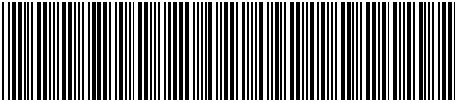
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	243.277	438.200	276.420	233.276	252.913	257.720	239.986	254.694	276.745	277.978	273.452	1.370.147	4.394.808
		BELANJA PEGAWAI	182.192	199.770	190.416	184.164	183.701	207.350	188.989	188.989	229.093	226.082	226.082	348.260	2.555.090
		BELANJA BARANG	61.085	238.430	86.004	49.113	69.212	50.370	50.997	65.704	47.652	51.896	47.369	573.078	1.390.909
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.809	448.809
		Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.809	448.809
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.809	448.809
		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	243.277	438.200	276.420	233.276	252.913	257.720	239.986	254.694	276.745	277.978	273.452	921.338	3.945.999
		51 BELANJA PEGAWAI	182.192	199.770	190.416	184.164	183.701	207.350	188.989	188.989	229.093	226.082	226.082	348.260	2.555.090
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	61.085	238.430	86.004	49.113	69.212	50.370	50.997	65.704	47.652	51.896	47.369	573.078	1.390.909
		PERKIRAAN PENERIMAAN	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2.592
		- PNBP (425131)	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2.592

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.417844/2025
IV A. B L O K I R



DS:0078-0732-5209-0055

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [417844] PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

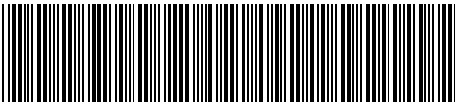
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 974.118 52 Belanja Barang Rp. 525.309 53 Belanja Modal Rp. 448.809		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 156.747 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.139 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.720 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.278 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
005.01.WA 1071	Program Dukungan Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Catatan Pengadaan Kendaraan Roda Empat 1 Unit Tidak Dapat Dicairkan Rp. 448.809 RKBMN Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6986 6986.EBA	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Layanan Dukungan Manajemen Internal 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.093 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.232 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 800	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.417844/2025
IV B. C A T A T A N



DS:0078-0732-5209-0055

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [29] BANTEN
Kode dan Nama Satker : [417844] PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
417844	PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 395.809		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Roda Empat 1 Unit Rp. 395.809		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001